

## MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGs) KONSEP PEMBANGUNAN KAPITALISME UNTUK DUNIA KETIGA

Pembangunan merupakan khasanah istilah yang tidak asing bagi setiap orang, bahkan orang desa pun mungkin tahu apa makna dari pembangunan itu sendiri. Pembangunan sudah melekat erat dalam benak pikiran kita, sehingga ketika mendengar istilah pembangunan maka yang terbayang dalam pikiran kita adalah adanya kesejahteraan. Makanya tidak salah kalau setiap ada momen kampanye, baik kampanye kepala daerah, bahkan sampai kampanye presiden maka janji pembangunan tidak akan pernah absen dalam penyampaian mereka, walaupun mungkin dalam kenyataannya nanti itu hanya sebuah capaian yang “nol besar”.

Kampanye pembangunan sudah lama kita dengar dan dilakukan sangat *intens*, kalau dulu pada masa orde baru kita mengenal konsep Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) untuk Indonesia. Pada saat ini rencana pembangunan sudah menjadi isu internasional. Terutama setelah PBB melalui UNDP mengajak negara-negara berkembang (miskin) untuk mendeklarasikan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang harus dicapai oleh negara-negara berkembang sebelum tahun 2015.

Program Millenium Development Goals ini sebetulnya sudah berlangsung sejak tahun 2000 akan tetapi *booming* kampanye program ini baru terjadi pada tahun 2007, karena memang selama masa setelah deklarasi sampai saat ini tujuan pembangunan ini belum ada yang tercapai dan bahkan jauh dari harapan yang diimpikan. Ini terbukti dengan fakta-fakta yang terjadi saat ini diantaranya adalah MDGs tidak berhasil menurunkan kematian 500.000 kaum perempuan akibat melahirkan setiap tahunnya di negeri-negeri miskin. MDGs juga tidak mampu berbuat banyak terhadap 827 juta orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim pada 10 tahun mendatang, 50 negara yang sudah semakin miskin, serta 65 negeri yang beresiko menyusul miskin 35 tahun lagi. (*The Human Development Report: 2005*). Di samping data tersebut di Asia Pasifik memiliki kantong-kantong kemiskinan di masing-masing negara (*pockets of poverty within countries*) dan tingginya penduduk yang masuk dalam kategori “poverty trap”. Tercatat 57 % dari 1,3 milyar penduduk miskin dunia berada di kawasan Asia-Pasifik (kurang lebih 700 juta orang) yang berarti melebihi jumlah seluruh rakyat Afrika. Juga jika terkait dengan kesejahteraan anak dan ibu, maka di Indonesia hal ini bisa dilihat pada tingkat angka kematian balita yang memiliki perbedaan dramatis antar propinsi, dengan jangka mulai dari 23 kematian per 1.000 kelahiran hidup hingga 103 kematian per 1000 kelahiran hidup. Sekitar separuh dari jumlah kematian bayi dan anak mungkin bisa dikaitkan pada kekurangan gizi, yang sering diawali dengan rendahnya berat bayi pada saat kelahiran. Tingkat kekurangan berat badan balita memang telah menurun secara nasional, namun masih lebih dari 40 % di kawasan timur Indonesia, dengan perbedaan yang sangat besar dibandingkan bagian barat Indonesia. Kurangnya tinggi badan dan berat badan anak masih tetap tinggi, masing-masing sekitar 34% dan 16 %. (*Laporan UNICEF 2006*).

Fakta yang terjadi itu seakan menjadi jawaban atas kegagalan program MDGs ini. Kita harusnya sadar, bahwa semua keterpurukan yang seolah-olah akan diselesaikan oleh program ini tidak akan pernah terjadi, karena memang desain negara-negara kapitalisme untuk membuat program ini tidak lain adalah untuk memperkuat jaringan kapitalisme global yang dapat semakin memperkuat hegemoni kapitalisme di dunia. Bagaimana tidak, kondisi saat ini menjadi sebuah sasaran empuk untuk mengambil keuntungan dengan menggulirkan program atas nama pembangunan, dengan formula yang dibangun oleh negara kapitalisme. Sekilas MDGs tampak manis, seakan-akan kemiskinan di negeri-negeri dunia ketiga adalah penyakit bawaan yang harus diobati oleh resep-resep dari pemerintahan negeri-negeri maju, pemilik hak veto PBB. Sehingga mereka membidani deklarasi MDGs untuk “*menolong*” negeri-negeri miskin. Seperti halnya *World Bank* dan *Asian Development Bank* yang “*bermurah hati*” mendanai berbagai proyek-proyek MDGs lewat berbagai skenario utang baru maupun *debt swap*.

Namun alangkah palsunya kebaikan tersebut ketika kita melihat kondisi rakyat di negara-negara berkembang semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara para kapitalisme berfoya-foya dan berbahagia dengan berbagai macam keuntungan yang diperoleh dari kekayaan di negara-negara berkembang. Ini sebuah fakta yang nyata yang harus dijadikan bukti tentang keberadaan program MDGs ini. Dari sini nanti kita akan mengetahui latar belakang dan tujuan digulirkannya program ini.

Dengan fakta-fakta kebusukan yang ada pada program ini akankah kita masih yakin kepada keberhasilan program ini? Yang sudah jelas kita ketahui “kedoknya” yaitu untuk memperkuat jaringan kapitalisme global. Dan apakah kita masih percaya pada janji negara kapitalisme terhadap kesejahteraan kita sendiri?

### Gambaran Program MDGs

MDGs adalah merupakan sebuah agenda global yang digulirkan atas nama UNDP yang memiliki 8 tujuan yaitu menghapuskan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan dasar untuk semua, persamaan gender dan penguatan peran perempuan, mengurangi angka kematian bayi, meningkatkan kesehatan ibu melahirkan, memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya, menjamin kelangsungan lingkungan dan membangun kerjasama global untuk pembangunan di negara berkembang. Kesuksesan program ini bukan hanya menjadi tanggung jawab negara sebagai institusi formal akan tetapi menjadi tanggung jawab kolektif seluruh warga negara/rakyat untuk memenuhi target pembangunan ini. Sehingga dalam hal ini harus banyak pihak yang berpartisipasi, salah satunya perusahaan-perusahaan yang harus mengeluarkan program CSR (*Corporate Sosial Responsibility*). Hampir semua perusahaan sekarang ini memiliki program CSR yang bertujuan untuk mendukung pencapaian target *Goals* dari pembangunan Millenium. Masyarakat pun dikatakan harus senantiasa mendukung program yang “mulia” ini, karena tanpa dukungan aktif dari masyarakat maka pencapaian tujuan MDGs tidak akan pernah

tercapai. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa dalam program ini partisipasi seluruh pihak mutlak adanya, dan bukan hanya partisipasi atau tanggung jawab negara saja.

Di samping itu selain peran dalam negeri maka, program MDGs ini mengharuskan adanya peran dari seluruh negara terutama negara-negara maju untuk ikut andil dalam program ini, yaitu kalau dalam program MDGs melewati jalur kerjasama global antar negara. Sebagaimana apa yang dinyatakan oleh Francois Bourguignon, Kepala Ekonom dan Senior Vice President untuk Ekonomi Pembangunan Bank Dunia, dia mengatakan bahwa, "*Saling bertanggung jawab adalah sangat penting bagi pencapaian kemajuan MDGs,*" dia juga menambahkan, "*Negara-negara kaya dan miskin, beserta lembaga-lembaga internasional, telah berkomitmen satu terhadap yang lainnya untuk meningkatkan, menyelaraskan dan menambah efektifitas bantuan, sambil meningkatkan tata kelola. Pemantauan atas kinerja dan kemajuan komitmen tersebut adalah penting guna memastikan bahwa semua pemain bertanggung jawab.*"

MDGs memang lahir sebagai respon kepanikan negeri-negeri maju dan lembaga-lembaga donor internasional akibat gagalnya resep ekonomi neoliberalisme yang mereka paksakan ke negeri-negeri dunia ketiga, seperti Indonesia. Resep ekonomi semacam itu terbukti membuat banyak negeri bangkrut dan jurang antara sedikit orang kaya dengan milyaran orang miskin semakin lebar. Itulah sebabnya setelah lima tahun, 8 cita-cita MDGs untuk menghapus kemiskinan tahun 2015, yang dideklarasikan oleh 189 negeri-negeri miskin, tidak satupun menunjukkan tanda-tanda keberhasilan.

### **MDGs dan Kapitalisme Global**

Kalau kita melihat secara jelas dan detail tentang program yang dilakukan oleh PBB ini maka kita akan memperoleh sebuah benang merah yang sesungguhnya tidak akan kita duga. MDGs yang diduga oleh sebagian besar masyarakat untuk meningkatkan pembangunan bagi rakyat hanyalah sebuah isapan jempol saja. Program ini hanyalah kebohongan yang mengatasnamakan pembangunan. Sebagaimana kita lihat ke delapan program ini hanyalah sebuah rekayasa "propaganda politik" yang dihembuskan oleh kapitalisme untuk eksistensi ideologinya itu sendiri, sehingga hegemoni kapitalisme di dunia akan semakin kuat.

Seperti kita katakan bahwa program-program yang diusung oleh MDGs ini kebanyakan adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok bagi setiap individu. Seperti kita lihat 5 dari program MDGs ini adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan bagi individu. Menempatkan program kesejahteraan dalam MDGs bukan tanpa alasan politik, akan tetapi kapitalisme sudah memikirkan ini secara matang, bahwa dengan menempatkan program ini maka akan terbentuk opini bahwa pelayanan pokok terhadap rakyat bukanlah semata tanggung jawab negara akan tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak. Dengan kata lain jangan menuntut negara terlalu banyak, jika negara memang tidak mampu untuk menyediakan pelayanan-pelayanan tersebut. Jangan salahkan negara jika negara tidak mampu mengentaskan kemiskinan dan kelaparan, dan program kesejahteraan lainnya. Dengan demikian negara akan terbebas dari tanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan bagi rakyatnya.

Sedangkan dua program yang lainnya merupakan program yang secara kasat mata jelas merupakan agenda kapitalisme. Seperti persamaan gender dan penguatan peran perempuan, ini merupakan program untuk menumbuhkan suburkan ide *feminisme* yang sudah lama berkembang yang notabene adalah ide yang muncul dari kapitalisme yang menganut kebebasan bagi setiap individu. Dengan menyertakan program ini maka kapitalisme tidak perlu susah-susah untuk menyebarkan ide *feminisme* ini ke wilayah lain, karena dengan sendirinya akan dibawa oleh program atas nama MDGs. Sedangkan tujuan untuk membangun kerja sama global untuk pembangunan di negara berkembang adalah sebuah langkah nyata untuk menancapkan kekuasaan ekonomi kapitalisme terhadap negara-negara berkembang. Sehingga jalan seperti investasi untuk meningkatkan pendapatan negara, membuka lapangan kerja dan sebagainya akan menjadi syarat untuk melakukan pembangunan itu. Padahal investasi hanyalah cara mengambil keuntungan yang besar bagi investor, sedangkan sebagai negara penerima investasi kita hanya mendapatkan royalti dan pajaknya saja.

Sehingga sebuah jalan kerja sama global hanyalah sebuah kedok untuk lebih memperkuat jaringan kapitalisme global yang selama ini memang ada dan nyata mereka praktekkan untuk mendukung hegemoninya di negara-negara berkembang. Sehingga kekuasaan kapitalisme dengan neoliberalisme dalam kerjasama global ini hanyalah sebuah tipuan belaka yaitu dengan kebaikan dana investasi yang mengucur kepada negara-negara berkembang. Namun alangkah palsunya kebaikan tersebut dihadapan kenyataan bahwa tata ekonomi dunia saat ini sangat merugikan negeri-negeri miskin. Ekonomi yang demikian membuat 2,5 miliar (40%) rakyat hidup di bawah 2 USD/hari, berbagi hanya 5% dari total pendapatan dunia, sementara 54% pendapatan tersebut masuk ke hanya 10% kantung orang-orang terkaya di negeri-negeri maju. Negeri-negeri miskin harus menanggung beban dan bunga utang yang luar biasa besar, sementara pemodal-pemodal asing negeri-negeri maju menguasai sumber-sumber alam di negara penerima investasi.

Inilah globalisasi ekonomi neoliberalisme yang bukan menggloalkan kemakmuran, melainkan kemiskinan. Yang memudahkan penjajahan baru lewat pemaksaan syarat-syarat demi kemudahan investasi dan perdagangan bebas; membuat sumber-sumber kekayaan alam di negeri-negeri dunia ketiga habis dimiliki oleh dan keuntungannya masuk ke kantung-kantung asing; membuat barang-barang asing bebas masuk; pemenuhan kebutuhan pokok yang semakin hari kian sangat sulit.

Dengan demikian kita tahu, bahwa MDGs palsu dan bohong karena negeri-negeri sarannya masih terus-menerus dipaksa membayar utang luar negeri yang seharusnya bisa digunakan untuk biaya kesejahteraan. MDGs hanyalah angangan karena uang dari hasil sumber alam kita juga dimiliki asing. Bahkan Bank Dunia (World Bank) dan ADB (Asian Development Bank) memberikan kita utang baru untuk membiayai MDGs, yang harus kita bayar cepat atau lambat.

## Paradigma Pembangunan Bagi Umat

Pembangunan dalam konteks Islam adalah merupakan tanggung jawab negara, sehingga tujuan pembangunan adalah untuk kepentingan umat. Sebagaimana sabda Rasulullah, **“Imam adalah pelayan dan dia bertanggung jawab penuh atas yang dipimpinnya.”** Dan memang Rasulullah pun juga pernah menyampaikan bahwa pemimpin itulah yang akan mengayomi dan sebagai pelindung bagi seluruh rakyatnya. Sebagaimana sabdanya, **“Sesungguhnya seorang imam itu adalah laksana perisai, maka orang-orang akan berperang di belakangnya dan menjadikannya sebagai pelindung (bagi dirinya)”** (HR. Muslim). Rasulullah pun juga bersabda terkait dengan tanggung jawab negara dalam mengurus rakyatnya, **“Bagi siapa saja yang diberi tanggung jawab kepemimpinan umat, dan menimbulkan kesulitan bagi mereka (umat), maka berikanlah kesulitan kepadanya. Dan bagi siapa saja yang berbuat baik kepada mereka, berikanlah kebaikan kepadanya”** (HR. Muslim). Dengan demikian tanggung jawab negara terhadap publik adalah sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Dan bagi pemimpin negara yang tidak menjalankan amanat sebagai pemimpin umat maka itu dianggap sebagai pengkhianatan yang besar kepada umat. Sebagaimana sabda Rasulullah, **“Setiap pengkhianat akan membawa bendera pada hari pembalasan yang akan dikibarkan sama tinggi dengan (tingkat) pengkhianatannya. Dan tidak ada pengkhianatan yang lebih besar dari pada pengkhianatan (yang dilakukan oleh) seorang pemimpin umat”** (HR. Muslim). Dengan demikian konteks pembangunan dalam Islam tidak lain adalah pembangunan dalam hal pelayanan kepada umat, yaitu terkait dengan pelayanan terhadap kesejahteraan rakyat bukan yang lain. Adapun negara dalam melakukan pembangunan ini harus senantiasa terikat dengan hukum syara' karena walaupun negara adalah satu-satunya pihak yang memiliki wewenang mutlak untuk melayani rakyat, akan tetapi negara juga harus senantiasa sesuai dengan hukum-hukum syara' yang diadopsi.

Dengan melihat paradigma pembangunan dalam konteks ini maka negara bisa mengusahakan berbagai macam cara untuk memberikan pelayanan kepada rakyatnya. Misalnya dengan memberikan kepemilikan umum kepada milik umum. Karena seperti kita ketahui bahwa saat ini rakyat Indonesia tidak pernah merasakan harta yang seharusnya menjadi milik umum. Seperti fakta yang terjadi dalam berbagai pertambangan-pertambangan di Indonesia yang seluruhnya dikuasai oleh investor asing yang notabene termasuk dalam jaringan kapitalisme global. Seperti tambang Freeport yang seharusnya bisa dinikmati oleh rakyat yang memiliki cadangan emas sebanyak 2,5 miliar ton, belum termasuk jenis tambang non-emas (Lihat: **Sabili edisi 16/Februari/2006**). Jumlah di atas akan bertambah dengan ditemukannya tambang emas baru yang bernilai lebih dari US\$ 60 miliar. Ini hanya kekayaan alam yang ada di satu tempat saja padahal kekayaan alam baik tambang ataupun kekayaan hayati di Indonesia sangat besar, dan tempatnya tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Sehingga tidak ada alasan negara tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. karena hasil kekayaan umum ini akan dikembalikan kepada umat dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pelayanan yang lainnya.

Andaikan harta kepemilikan umum kurang untuk memenuhi kebutuhan dalam pelayanan kepada rakyat maka, negara bisa mengambil dana anggaran lain yang ada di baitul maal. karena sesungguhnya harta yang ada di baitul maal tidak lain juga bisa diperuntukkan untuk melayani kebutuhan bagi warga negara. Harta di baitul maal bukan hanya untuk para pejabat saja, akan tetapi juga harus digunakan untuk kepentingan umat, sehingga dana-dana negara tidak menjadi ladang korupsi. Sebagaimana dilaporkan Bank Dunia dalam *Indonesia Country Procurement Assessment Report, Reforming the Public Procurement Assessment System* (2003) dan Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa korupsi di Indonesia terbesar terjadi di bidang pengadaan barang/jasa, yaitu 77% dari total jumlah korupsi. Jumlah yang diperkirakan dikorupsi dari bidang ini setiap tahun mencapai hingga Rp. 70 triliun. Sedangkan prediksi masa korupsi di mulai zaman orde baru sampai sekarang, maka sudah 40 tahunan, jika kita jumlahkan maka nilainya kurang lebih mencapai Rp. 2.800 triliun. Bayangkan uang negara yang dikorupsi itu bisa digunakan untuk membangun guna kesejahteraan rakyat, pastinya fasilitas umum dan kebutuhan rakyat yang lain akan terpenuhi dengan mudah, sehingga masyarakat tidak perlu susah lagi terkait dengan bagaimana berusaha untuk memenuhi kebutuhannya karena sarana infrastruktur umum sudah sangat memadai.

Adapun negara dalam mengelola sumber-sumber alam kepemilikan umum juga tidak hanya berorientasi pada eksplorasi akan tetapi juga pada pelestarian dan penjagaan lingkungan. Karena lingkungan juga merupakan hal yang harus dijaga karena berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Dan karena Islam dalam melihat kehidupan ini juga tidak hanya melihat pada sisi materi saja yaitu untuk mendapatkan nilai materi dari alam saja. Akan tetapi Islam melihat alam semesta ini merupakan bagian dari ciptaan Allah yang diperuntukkan bagi manusia sehingga manusia harus menjaga kelangsungannya dan dalam hal ini negara juga senantiasa berusaha bagaimana kelangsungan alam semesta ini senantiasa bisa memberikan penghidupan bagi manusia/rakyat secara terus-menerus. Akan tetapi jika terjadi kerusakan lingkungan baik yang itu dilakukan oleh individu, perusahaan, bahkan negara dalam hal ini kepala negara maka bisa diberlakukan hukum *dharar* kepada pelaku perusakan lingkungan itu. Sehingga penegakan hukum atas perbuatan *dharar* yaitu melalui perusakan lingkungan maka akan dikenai sanksi yang itu ditetapkan oleh pengadilan. Karena perbuatan *dharar*/membahayakan itu merupakan perbuatan haram yang dilarang oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, **“la dharara wala dhirara”** (**Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain**). Dengan dasar itu maka perbuatan *dharar* itu harus dihilangkan. Jadi jika ada individu, perusahaan, atau bahkan negara melakukan perbuatan *dharar* maka bisa diajukan ke pengadilan, semisal melakukan pembalakan hutan, dan sebagainya yang membahayakan kelangsungan hidup. Dengan hal ini maka tidak perlu adanya tujuan MDGs untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dengan beberapa penjelasan di atas maka pembangunan harus berorientasi pada pemenuhan pelayanan negara kepada rakyatnya, guna untuk memberikan kesejahteraan, keamanan dan kebutuhan yang diperlukan oleh warga negara.

## **Ikhtitam**

Sebagai sebuah kesimpulan kita bisa katakan bahwa delapan tujuan pembangunan melalui MDGs tidak lain hanyalah merupakan sebuah kebohongan belaka. Itu semua merupakan usaha kapitalisme untuk menancapkan hegemoninya di negara-negara berkembang. MDGs hanyalah alat yang diselubungkan untuk menyukseskan program kapitalisme. MDGs tidak lain hanyalah bentuk imperialisme baru yang diterapkan kapitalisme untuk menguasai negeri-negeri berkembang termasuk negeri-negeri kaum muslimin.

Sehingga sebagai umat Islam kita harus kembali kepada Islam, kita harus mengusahakan bagaimana kita bisa merubah keadaan umat Islam saat ini yang dalam keadaan hina agar memperoleh keadaan yang aman dan sentosa sebagaimana Allah telah sampaikan dalam Surat An Nur ayat 55, ***“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa.”*** Wallahu a'lam bisshawab.